

Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur

Anandita Vivian Salsa Billa

Institut Agama Islam Negeri Metro

Mely Widiyastuti

Institut Agama Islam Negeri Metro

Olivia Yonata

Institut Agama Islam Negeri Metro

Yesi Lita Sari

Institut Agama Islam Negeri Metro

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara, Banjar Rejo, Kec. Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
ananditavs@gmail.com

***Abstract:** This research aims to analyze the regional financial management system in achieving development performance in Bandar Jaya Timur Subdistrict. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation studies. The research results show that the regional financial management system in Bandar Jaya Timur Subdistrict is not optimal. Budget planning is still not fully participatory, coordination between village and sub-district governments still needs to be improved, and monitoring of budget realization is not carried out regularly. This has an impact on development performance achievements that are not yet optimal, such as basic infrastructure development, developing local economic potential, and improving the quality of public services. To improve development performance, it is recommended that regional governments optimize regional financial management systems by increasing transparency, accountability and community participation in the budget planning, implementation and monitoring processes.*

***Keywords:** Regional Financial Management System, Development Performance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai kinerja pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Kelurahan Bandar Jaya Timur belum optimal. Perencanaan anggaran masih belum sepenuhnya partisipatif, koordinasi antara pemerintah desa dan kelurahan masih perlu ditingkatkan, dan pengawasan terhadap realisasi anggaran belum dilakukan secara berkala. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pembangunan yang belum maksimal, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan, disarankan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.

Katakunci: Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan.

LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Kelurahan Bandar Jaya Timur, pengelolaan keuangan daerah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Berdasarkan observasi awal, terlihat bahwa perencanaan anggaran masih belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, koordinasi antara pemerintah desa dan kelurahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan, serta pengawasan terhadap realisasi anggaran belum dilakukan secara berkala dan komprehensif. Kondisi tersebut diduga berdampak pada capaian kinerja pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur yang belum maksimal. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum masih belum merata, pengembangan potensi ekonomi lokal belum optimal, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kelurahan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah di Kelurahan Bandar Jaya Timur dan kaitannya dengan pencapaian kinerja pembangunan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mendukung tercapainya kinerja pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Landasan hukum yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang sudah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan umum atau yang sering di sebut pengurusan bendaharawan “ Pengelolaan Keuangan”. Dalam pengelolaan anggaran daerah harus mengikuti pokok anggaran sektor publik.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah

- Akuntabilitas: Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada publik.
- Transparansi: Keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat.
- Partisipatif: Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran.
- Value for Money: Ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran.
- Kejujuran: Pengelolaan keuangan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban)

1) Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan rencana keuangan daerah yang memuat gambaran penerimaan dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan keuangan daerah yang baik harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan harus memperhatikan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.

2) Penganggaran Daerah

Penganggaran daerah merupakan proses penyusunan anggaran daerah yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran daerah harus disusun secara realistis dan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3) Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan proses pelaksanaan anggaran daerah yang meliputi pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel.

4) Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Inspektorat Daerah.

5) Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan daerah merupakan proses penyampaian informasi keuangan daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan daerah harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan relevan.

B. Kinerja Pembangunan Daerah

Kinerja pembangunan daerah mengacu pada sejauh mana suatu daerah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diukur melalui berbagai indikator untuk menilai kemajuan dan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Kinerja pembangunan daerah mencerminkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

- a. Peningkatan ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan daya beli masyarakat.
- b. Pengembangan sosial: Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.
- c. Pemerataan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi.
- d. Pelestarian lingkungan: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Indikator-indikator kinerja pembangunan daerah

1. Indikator Ekonomi
 - a. Pertumbuhan Ekonomi: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
 - b. Tingkat Pengangguran: Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan.
 - c. Pendapatan Per Kapita: Rata-rata pendapatan yang diperoleh per individu di suatu daerah.
2. Indikator Sosial
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mengukur kesejahteraan manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
 - b. Tingkat Kemiskinan: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
 - c. Akses Terhadap Pendidikan: Tingkat partisipasi sekolah dan angka melek huruf.
3. Indikator Lingkungan
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam.
 - b. Kualitas Lingkungan Hidup: Indikator polusi udara, air, dan tanah.
 - c. Upaya Konservasi: Program dan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah

Kinerja pembangunan daerah merupakan cerminan dari efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai faktor dapat memengaruhi kinerja pembangunan daerah, baik internal maupun eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi kinerja pembangunan daerah, antara lain:

- Kepemimpinan: Kepemimpinan yang kuat, visioner, dan berkomitmen tinggi dari kepala daerah dan jajarannya sangatlah penting untuk mendorong kinerja pembangunan daerah.

- Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah: Kapasitas aparatur pemerintah daerah yang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan sangatlah penting untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien.
- Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel dapat membantu memastikan penggunaan sumber daya secara optimal dan terhindar dari korupsi.
- Ketersediaan Dana: Ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan merupakan faktor penting dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah.
- Perencanaan Pembangunan Daerah: Perencanaan pembangunan daerah yang matang, komprehensif, dan berbasis data dapat membantu mengarahkan pembangunan agar tepat sasaran dan efektif.
- Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja pembangunan daerah, antara lain:

- Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi makro nasional dan regional dapat memengaruhi ketersediaan dana dan peluang investasi di daerah.
- Kondisi Sosial Politik: Kondisi sosial politik yang stabil dan kondusif dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.
- Kemajuan Teknologi: Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya.
- Kerjasama Antar Daerah: Kerjasama antar daerah dengan pemerintah pusat, daerah lain, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dapat membantu mempercepat kemajuan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara mendalam dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti aparat pemerintah kelurahan, perwakilan masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan penganggaran di tingkat kelurahan. Melalui wawancara, diperoleh informasi kualitatif mengenai proses, isu, dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah serta kaitannya dengan program pembangunan di kelurahan.

Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati secara langsung implementasi pengelolaan keuangan daerah serta dampaknya terhadap kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Observasi mencakup kegiatan-kegiatan pembangunan, pemanfaatan anggaran, dan interaksi antara aparat pemerintah dengan warga. Dokumentasi berupa data-data sekunder, seperti laporan keuangan daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta arsip terkait program pembangunan di kelurahan, juga dikumpulkan dan dianalisis untuk memperkaya pemahaman mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan di wilayah studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengungkapkan bahwa sistem perencanaan anggaran daerah di Kelurahan Bandar Jaya Timur belum optimal. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat kelurahan masih memiliki kesenjangan antara prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan kelurahan dalam proses perencanaan anggaran belum berjalan efektif.

Dalam hal koordinasi pemerintah desa dan kelurahan, terdapat perbedaan pemahaman terkait peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak masih lemah, terutama dalam hal penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran daerah juga masih terbatas.

Terkait sistem pengawasan, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah belum berjalan optimal. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran daerah di tingkat kelurahan masih memiliki kelemahan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam mengawasi realisasi anggaran daerah juga belum maksimal.

Kesenjangan antara alokasi anggaran daerah dengan capaian indikator kinerja pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran daerah masih belum optimal dalam mendukung program-program pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang terbatas dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Kelurahan Bandar Jaya Timur belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang optimal. Perbaikan dalam aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan keterkaitan antara pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai kinerja pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Proses perencanaan anggaran daerah di tingkat kelurahan belum optimal. Terdapat kesenjangan antara prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta koordinasi antara pemerintah desa dan kelurahan dalam proses perencanaan anggaran yang masih lemah.
2. Koordinasi antara pemerintah desa dan kelurahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah belum berjalan efektif. Perbedaan pemahaman terkait peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mekanisme komunikasi dan koordinasi yang masih lemah, berdampak pada kurang optimalnya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran daerah juga masih terbatas.
3. Sistem pengawasan terhadap realisasi anggaran daerah di Kelurahan Bandar Jaya Timur belum berjalan dengan baik. Pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah masih memiliki kelemahan, serta peran lembaga pengawas seperti BPD dan LPMD belum dimanfaatkan secara maksimal.

4. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara alokasi anggaran daerah dengan capaian indikator kinerja pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur, menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam mendukung program-program pembangunan masih belum optimal. Partisipasi masyarakat yang terbatas dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan keuangan daerah di Kelurahan Bandar Jaya Timur belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang optimal. Perbaikan dalam aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong kinerja pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Memperkuat proses perencanaan anggaran daerah di tingkat kelurahan dengan melibatkan pemerintah desa secara lebih efektif, serta menyesuaikan prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan kelurahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses penyusunan anggaran.
3. Memperbaiki sistem pengawasan internal melalui peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah, serta mengoptimalkan peran lembaga pengawas seperti BPD dan LPMD dalam mengawasi realisasi anggaran daerah.
4. Melakukan evaluasi dan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam mendukung kinerja pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah dan mendorong kinerja pembangunan yang lebih optimal di Kelurahan Bandar Jaya Timur.

DAFTAR REFERENSI

- Ambya, S. E. (2023). **Ekonomi Keuangan Daerah**. Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Kamasan, W., A. A Gede Raka, & I Made Sumada. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Badung. **Jurnal Administrasi Publik, 4**.
- Mustaqim, A. Md., & Senen. (2023). **Manajemen Keuangan Daerah**. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Peraturan Pemerintah. (2019). Pub. L. No. 12.
- Priskila, E., & Hukom, A. (2023). Evaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. **Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 2**.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2020). Pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). **Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3**.
- Rukmini, M., & Nuwa, C. A. W., dkk. (2022). **Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tata Kelola Menuju Pemerintahan Yang Baik**. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Sangkala, & Salman, D. (2019). **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Diandra Kreatif.
- Segah, B., & Kaharap. (2022). Pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagai salah satu unsur dari pengawasan. **Restorica, 8**.